PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TIMUR

BUKU PANDUAN

MUSRENBANG RKPD
PROV. JAWA TIMUR
TAHUN 2018

Surabaya, 12 April 2017

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Pahlawan 102-108 Telp. (031) 3533896 Fax (031) 3534339
S U R A B A Y A 60174

KATA PENGANTAR

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 ini merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 yang prosesnya telah diawali dengan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota pada 8 – 31 Maret 2017 dan serta Pra Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan pada 5-6 April 2017.

Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh peserta untuk dapat berperan aktif pada Musrenbang Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 sebagai forum tertinggi penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Jawa Timur dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

Selamat mengikuti Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. Terima kasih atas partisipasinya dan semoga kegiatan ini dapat menjadi awal dari pelaksanaan pembangunan di Tahun 2018 yang lebih baik.

Surabaya, 12 April 2017

Panitia Penyelenggara

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

B. DASAR HUKUM

C. TUJUAN

D. MASUKAN

E. MEKANISME PENYELENGGARAAN

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

G. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

H. PESERTA DAN AGENDA ACARA

I. INFORMASI BAGI PESERTA

J. PEMBIAYAAN

K. DAFTAR UNDANGAN

A. PENDAHULUAN

Dalam upaya melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan dilakukan melalui proses koordinasi antar instansi pemerintah dan proses partisipasi antar seluruh pelaku pembangunan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019.

Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 ini sebagai satu kesatuan sistem perencanaan dan dilaksanakan setelah Musrenbang Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut sejalan dengan amanah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top down)* dan bawah-atas *(bottom up).*

Perencanaan pembangunan dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan pendekatan *top down* (atas bawah) dan *bottom up* (bawah atas) melalui penyelarasan usulan program/kegiatan hasil

Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, sampai dengan Kabupaten/Kota sebagai dasar pada penyusunan Rancangan RKPD yang didalamnya memuat substansi berbagai kebijakan, program/kegiatan yang diusulkan pada belanja APBD Provinsi.

Melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 ini diharapkan dapat menghasilkan program/kegiatan yang partisipatif dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Sesuai Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 diamanahkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah.

Masyarakat, pemerintah, dan swasta merupakan elemen penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, dibutuhkan aspirasi – aspirasi dari para pemangku kepentingan sebagai variabel dalam penetapan program prioritas pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan dan pemerataan hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan dan berkesinambungan untuk dituangkan dalam rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. Sebagai bentuk korelasi antara substansi RKPD dengan kerangka pendanaan dalam RKPD, maka dukungan partisipasi sumber daya masyarakat dan sumber pendanaan lainnya adalah elemen penting yang harus diupayakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan, disamping pembiayaan yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Timur.

Pelaksanaan proses sinkronisasi program dan pendanaan melalui Musrenbang Provinsi ini diharapkan akan terbangun

struktur perencanaan penganggaran yang mampu merealisasikan solusi terhadap permasalahan – permasalahan yang dihadapi Jawa Timur.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

C. TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 adalah untuk :

1. Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota;

2. Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah Provinsi melaui Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota dan/atau sebelum Musrenbang RKPD Provinsi dilaksanakan;
3. Mempertajam 6ndicator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi; dan
4. Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.

D. MASUKAN

Masukan dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 antara lain adalah :

1. Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.
2. Rancangan awal Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.
3. Rancangan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2017 yang sudah diperbaharui sesuai hasil Musrenbang Kabupaten/Kota.
4. Hasil Pelaksanaan Pra Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

E. MEKANISME PENYELENGGARAN

Kegiatan Musrenbang Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 meliputi Sidang Pleno dan Sidang Kelompok Bidang.

1. Susunan Acara Sidang Pleno (Ballroom Grand City Mall dan Convex Lt.4 Surabaya) terdiri dari :
   a. Laporan Ketua Panitia oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur;

b. Penyerahan Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Jawa Timur;
c. Pengarahan dan Pembukaan oleh Gubernur Jawa Timur;
d. Pengarahan oleh Menteri Dalam Negeri*;*
e. Pokok – Pokok Pikiran DPRD Provinsi Jawa Timur oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur;
f. Pengarahan oleh Menteri Perindustrian;
g. Pengarahan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
h. Pengarahan oleh Menteri Keuangan;
i. Pokok – Pokok Pikiran DPR RI oleh Komisi XI DPR RI Dapil Jawa Timur
j. Pengarahan oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas*;*
k. Pokok – Pokok Pikiran Kepala Daerah oleh Bupati Bojonegoro;
l. Dialog/ Tanya Jawab.

2. Susunan Acara Sidang Kelompok Bidang terdiri dari:
   a. Paparan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018;
   b. Diskusi dan Tanya Jawab;
   c. Penunjukan Wakil Peserta;
   d. Pembacaan Berita Acara Kesepakatan;
   e. Penandatangan Berita Acara Kesepakatan.
3. Mekanisme Pelaksanaan Sidang Kelompok Bidang:
   a. Peserta mengisi daftar hadir yang disediakan panitia;
   b. Panitia melakukan pembagian;
   c. Sidang kelompok dilaksanakan secara panel dan dipandu oleh moderator, dengan 3 (tiga) penyaji yang berasal dari

Bappeda Provinsi dan terbagi sesuai Bidang di Bappeda, yaitu :

i. Bidang Ekonomi dan Pendanaan;
ii. Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang;
iii. Bidang Sosial Budaya serta Pengendalian dan Evaluasi;

d. Pemaparan program prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 sesuai dengan Rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018;
e. Sesi diskusi dan tanya jawab dipandu oleh moderator untuk mendapat tanggapan, penajaman, dan klarifikasi terkait program prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018;
f. Perumusan hasil pembahasan (tanggapan, pertanyaan, masukan, dan sebagainya) dari peserta untuk dituangkan ke dalam rancangan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018;
g. Penunjukan Wakil Peserta untuk penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018
h. Pembacaan Berita Acara Kesepakatan Musrenbang Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur atau Pejabat Bappeda Provinsi Jawa Timur yang ditunjuk;
i. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan oleh perwakilan dari unsur pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Perangkat Daerah (PD) Provinsi, Ormas/LSM, atau unsur lainnya sebagaimana yang hadir dalam daftar hadir;
j. Penutupan

F. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dilaksanakan selama 1 (satu) hari, yang terbagi menjadi :

1. Sidang Pleno yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2017 pukul 09.00 -12.30 WIB, bertempat di Ballroom Grand City Mall & Convex Surabaya.
2. Sidang Kelompok yang dilaksanakan setelah Sidang Pleno selesai atau pukul 13.00 – 17.00 Wib, bertempat di Ballroom Grand City Mall & Convex Surabaya. Grand City Mall Convex Surabaya.

G. PESERTA DAN AGENDA ACARA

Peserta Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 ini, terdiri dari :

1. Sidang Pleno yang diikuti oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Prov. Jawa Timur, Asisten Setda Provinsi Jawa Timur, Staf Ahli Gubernur Jawa Timur, Forpimda Provinsi Jawa Timur, Bupati/Walikota se-Jawa Timur, Kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur, Ketua DPRD se-Jawa Timur, Perguruan Tinggi, LSM/Ormas, dan Tokoh Masyarakat.
2. Sidang Kelompok Teknis diikuti oleh Kepala Bidang Bappeda Provinsi, Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 3 (tiga) Kepala Bidang Bappeda Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, perwakilan CSR

Kabupaten/Kota se-Jawa Timur BUMN, BUMD, swasta, instansi vertikal, Perguruan Tinggi, LSM Ormas dan Tokoh Masyarakat.

Pembagian peserta sidang kelompok teknis yang terdiri dari Bidang Ekonomi, Prasaranan Wilayah, dan Bidang Sosial Budaya serta Pengendalian dan Evaluasi dengan sebagai berikut :

A. KELOMPOK BIDANG EKONOMI DAN PENDANAAN

1) PERANGKAT DAERAH PROV. JATIM

1. Biro Adm. Perekonomian
2. Biro Adm. Sumber Daya Alam
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Dinas Koperasi dan UKM
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7. Dinas Kehutanan
8. Dinas Peternakan
9. Dinas Perkebunan
10. Dinas Kelautan dan Perikanan

2) DPRD PROVINSI :

Anggota Komisi C dan B

3) KABUPATEN/KOTA

1. Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten/Kota se-Jawa Timur
2. CSR/TSP Kabupaten/Kota se-Jawa Timur

4) BUMN/ BUMD/SWASTA/ DEPARTEMEN/NON DEPARTEMEN

1. PT. Lamongan Integreted Shorbase/LIS
2. PT. SIER
3. PTPN X
4. PTPN XII
5. Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan Jawa Timur
6. Balai Teknologi Pertanian Jawa Timur di Karangploso
7. Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat Malang
8. Pusat Veterinaria Farma Surabaya
9. KADIN (Kamar Dagang dan Industri)
10. AEKI (Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia)
11. KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan)
12. KPTRI (Koordinator Pengusaha Tebu Rakyat Indonesia)
13. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
14. GPEI (Gabungan Perusahaan Eksport Indonesia)
15. Asosiasi Eksportir dan Produsen Handycraft Indonesia
16. GINSI (Gabungan Inportir Seluruh Indonesia)
17. HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia)
18. Dekranasda Jawa Timur
19. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Jawa Timur
20. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Jawa Timur

21. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Negara
22. Kakanwil Ditjen Pajak Jawa Timur
23. Kakanwil Bea dan Cukai
24. Bank Indonesia
25. BNI
26. Bank Mandiri
27. Bank BRI
28. Bank Jatim
29. Bank Tabungan Negara (BTN)
30. PT. BPR Jatim
31. PT. Wira Jatim
32. Jatim Investment Management (JIM)
33. PT. Jatim Graha Utama
34. PT. Petrogas Jatim Utama
35. PT. Jatim Marga Utama
36. PT. Petrokimia Gresik
37. PT. Semen Indonesia, Tbk.
38. PT. CP Prima Pokhpan Sidoarjo
39. PT. Unilever Surabaya
40. PT. Sampoerna Surabaya
41. PT. Nestle Indonesia Pasuruan
42. PT. Ajinomoto Mojokerto
43. PT. Japfa Comfeed Sidoarjo
44. PT. Gudang Garam Kediri
45. PT. Maspion
46. PT. Tjiwi Kimia Mojokerto
47. PT. Cheil Jedang Jombang
48. PT. Astra Internasional, Tbk. Surabaya
49. Ketua Forum CSR Prov. Jatim

50. Perwakilan Unicef
51. World Bank
52. USAID
53. AUSAID
54. JICA

B. KELOMPOK BIDANG PRASARANA WILAYAH DAN TATA RUANG

1) PERANGKAT DAERAH PROV. JATIM

1. Biro Adm. Pembangunan
2. Dinas Perhubungan
3. Dinas PU Bina Marga
4. Dinas PU Sumber Daya Air
5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Dinas Lingkungan Hidup
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2) DPRD PROVINSI :

Anggota Komisi D

3) KABUPATEN/KOTA

Bidang Praswil dan Tata Ruang BAPPEDA Kabupaten/Kota se-Jatim

4) BUMN/BUMD/SWASTA/DEPARTEMEN/ NON DEPARTEMEN

1. BPLS LAPINDO
2. DPD GAPASDAP Jatim
3. DPD ORGANDA Jawa Timur
4. Balai Konservasi Sumberdaya Alam

5. Taman Nasional Meru Betiri
6. Taman Nasional Alas Purwo
7. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
8. Taman Nasional Baluran.
9. Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP)
10. Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI)
11. BPN Jawa Timur
12. DAOP VIII PT. KAI Surabaya
13. PT. INKA Madiun
14. Perusahaan Daerah Air Bersih Prov. Jatim
15. PT. Jasa Tirta I
16. PT. Angkasa Pura I
17. Pelindo III
18. Balai V Jalan Nasional
19. Balai Besar Wilayah Sungai Brantas
20. REI Jawa Timur
21. PT. PLN (Persero)
22. PT. PLN Distribusi Jawa Timur (Persero)
23. Perusahaan Gas Negara (PGN)
24. PT. Pertamina (Persero) Region V Surabaya
25. Kepala BPWS Suramadu Jawa Timur
26. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo
27. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Jawa Timur
28. Satker Air Minum dan Sanitasi Jawa Timur
29. Satker Pengembangan Permukiman Jawa Timur

30. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Juanda, Surabaya
31. Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya
32. Forum DAS Malang
33. Forum DAS Jawa Timur
34. GABPENSI (Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesia)
35. Gapeknas (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional)
36. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)

C. KELOMPOK BIDANG SOSIAL BUDAYA SERTA PENGENDALIAN DAN EVALUASI

1) PERANGKAT DAERAH PROV.JATIM

1. Biro Adm. Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2. Biro Umum
3. Biro Hukum
4. Biro Adm. Kesejahteraan Sosial
5. Biro Organisasi
6. Biro Humas dan Protokol
7. Dinas Kesehatan
8. Dinas Sosial
9. Dinas Pendidikan
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
12. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

15. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan
16. Satuan Polisi Pamong Praja
17. Badan Kepegawaian Daerah
18. Badan Pendidikan dan Pelatihan
19. Badan Penghubung Daerah Provinsi
20. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
21. Inspektorat Provinsi
22. Sekretariat DPRD Provinsi
23. RSU. Karsa Husada Batu
24. RS. Paru Jember
25. RS. Paru Dungus Madiun
26. RS. Kusta Kediri
27. RS. Kusta Sumberglagah Mojokerto
28. RS. Mata Masyarakat Jawa Timur
29. RS. Paru Surabaya
30. RS. Moehammad Noer Pamekasan
31. RS. Paru Manguharjo Madiun
32. Akademi Keperawatan Madiun
33. Akademi Gizi Surabaya
34. UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati – Lawang
35. RSU Dr. Soetomo Surabaya
36. RSU Dr. Saiful Anwar Malang
37. RSU Dr. Soedono Madiun
38. RS. Haji Surabaya
39. RS. Jiwa Menur Surabaya
40. Badan Penelitian dan Pengembangan
41. Dinas Komunikasi dan Informatika

42. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
43. Badan Pendapatan Daerah
44. Bakorwil I Madiun
45. Bakorwil II Bojonegoro
46. Bakorwil III Malang
47. Bakorwil IV Pamekasan
48. Bakorwil V Jember

2) DPRD PROVINSI

Anggota Komisi A dan E

3) KABUPATEN/KOTA

Bidang Sosial Budaya serta Pengendalian dan Evaluasi BAPPEDA Kabupaten/Kota se-Jatim

4) BUMD/DEPARTEMEN/NON DEPARTEMEN

1. Kanwil Kementerian Agama
2. Kanwil Kementerian Kehakiman dan HAM
3. BKKBN Jawa Timur
4. Kantor Regional II BKN Jawa Timur
5. BPS Jawa Timur
6. BPKP Jawa Timur
7. Kantor Perwakilan BPK Jawa Timur
8. KPU Provinsi Jawa Timur
9. PT. BPJS Divisi Regional VII Jatim
10. PT. Taspen (Persero)
11. Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim,
12. Yayasan Abdi Asih Surabaya
13. Pusat Pelayanan Terpadu/PPT Jatim
14. APJATI (Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia)
15. Lakpesdam NU

16. Ketua Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
17. Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur
18. SBSI (Serikat Buruh Seluruh Indonesia)
19. SPSI (Serikat Pekerja seluruh Indonesia)
20. SARBUMUSI (Serikat Buruh Muslim Indonesia)
21. Ketua Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS Prov. Jatim
22. Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Jatim
23. Ketua Aisyah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur
24. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur
25. Ketua KOPWAN Setia Bakti Wanita Surabaya
26. Pengasuh Ponpes Darul Ulum Jombang
27. Pengasuh Ponpes Tebu Ireng Jombang
28. Pengasuh Ponpes Tambak Beras Den Anyar Jombang
29. Pengasuh Ponpes Al Amin Preduan Pamekasan
30. Ketua Fatayat NU
31. Ketua Muslimat NU
32. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur
33. DPW Muhammadyah Jawa Timur
34. DPW NU Jawa Timur
35. PGI Wilayah Jawa Timur
36. Walubhi Jawa Timur
37. Parisadha Hindhu Darma Indonesia (PHDI) Jawa Timur
38. Komite Lintas Agama (KLA)

39. Ketua MUI Jawa Timur
55. TVRI Jawa Timur
56. RRI Regional Surabaya
57. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
58. PT. TELKOM Jawa Timur

JADWAL MUSRENBANG RKPD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018
SURABAYA, 12 APRIL 2017

WAKTU	ACARA	PENYAJI	MODERATOR	PESERTA		TEMPAT
08.30 -09.00	Registrasi	Panitia		1	Gubernur / Wakil Gubernur Jawa Timur	Grand Ballroom Lantai 4 Grand City Mall & Convex Jl. Gubeng Pojok Dalam No. 1-9 Surabaya
				2	Pimpinan DPRD Prov. Jatim	
				3	FORPIMDA	
				4	Sekda Prov. Jatim	
				5	Asisten Sekda Prov. Jatim	
				6	Kepala BAPPEDA Prov. Jawa Tengah dan Bali	
				7	Kepala BAPPEDA Prov. Jatim	

WAKTU	ACARA	PENYAJI	MODERATOR	PESERTA		TEMPAT
				8	Kepala PD Prov. Jatim	
				9	Bupati/ Walikota	
				10	Kepala BAPPEDA Kab/Kota	
				11	BUMD/ Dept/ Non Dept/ PT/ LSM/ Ormas	
				12	BEM	
SIDANG PLENO						
09.00-09.05	Pembukaan sekaligus Menyanyikan Lagu "Indonesia Raya"	Protokol	Protokol	Sda		Sda
09.05-09.07	Pembukaan MC	Protokol	Sda	Sda		Sda
09.07-09.10	Pembacaan Do'a	Biro Adm. Kes.Sos	Sda	Sda		Sda
09.10-09.17	Laporan Panitia	Kepala BAPPEDA Prov. Jatim	Sda	Sda		Sda
09.17-09.20	Penyerahan Penghargaan Anugerah Pangripta	Gubernur Jawa Timur	Sda	Sda		Sda

WAKTU	ACARA	PENYAJI	MODERATOR	PESERTA	TEMPAT
	Nusantara Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Jawa Timur				
09.20-10.00	Sambutan dan Paparan Gubernur Jawa Timur tentang prioritas RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 sekaligus membuka acara	Gubernur Jawa Timur	Sda	Sda	Sda
10.00-11.00	Pengarahan Menteri Dalam Negeri dengan Materi "Percepatan Regulasi Pendukung Implementasi Undang-Undang No. 23 Th. 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pelaksanaan Manajemen Pemerintah di Daerah"	Menteri Dalam Negeri	Sda	Sda	Sda
11.10-11.25	Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Jawa Timur	Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur	Sda	Sda	Sda

WAKTU	ACARA	PENYAJI	MODERATOR	PESERTA	TEMPAT
11.25-12.05	Pengarahan Menteri Perindustrian dengan Materi "Kebijakan Nasional Sektor Perindustrian Dalam Meningkatkan Perekonomian Jawa Timur"	Menteri Perindustrian	Sda	Sda	Sda
12.05-12.45	***Istirahat/ Sholat/ Makan***				
13.00-13.20	Pengarahan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Materi "Prioritas Pembangunan Infrastruktur di Jawa Timur Dalam Mendukung Pencapaian Target Pembangunan Nasional"	Menteri PU & PR	Sda	Sda	Sda
13.20-13.40	Pengarahan Menteri Keuangan dengan Materi "Kebijakan Fiskal untuk Mengakselerasi Pembangunan Nasional	Menteri Keuangan	Sda	Sda	Sda

WAKTU	ACARA	PENYAJI	MODERATOR	PESERTA	TEMPAT
	Tahun 2018”				
13.40-13.50	Pokok-Pokok Pikiran DPR RI	Komisi XI DPR RI Dapil Jatim	Sda	Sda	Sda
13.50-14.00	Pokok-Pokok Pikiran Kepala Daerah	Bupati Bojonegoro	Sda	Sda	Sda
14.00-15.00	**Dialog/ Tanya Jawab**	Gubernur Jawa Timur	Sda	Sda	Sda
15.00-15.30	Pengarahan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dengan Materi “Implementasi Kebijakan Pembangunan Nasional di Wilayah Jawa Timur Tahun 2018 bagi Pencapaian Target Pembangunan Nasional”	Menteri PPN/Kepala BAPPENAS			
SIDANG KELOMPOK					
15.30 -17.15	1) Bidang	Kepala Bidang Ekonomi	Panitia	Komisi-Komisi DPRD Prov. Jatim,	Sda

WAKTU	ACARA	PENYAJI	MODERATOR	PESERTA	TEMPAT
	Ekonomi & Pendanaan	Kepala UPT Pelayanan Data Perencanaan & Pendanaan Pembangunan		PD Prov. Jatim, Bappeda Kab/Kota, BUMN/ BUMD/Swasta/ Dept/ Non Dept/ PT/ LSM/ Ormas, dll	
	2) Bidang Praswil & Penataan Ruang	Kepala Bidang Praswil Kepala UPT Penataan Ruang dan Geospasial	Sda		Sda
	3) Bidang Sosial Budaya dan Dalev	Kepala Bidang Sosial Budaya Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Sda		Sda
17.15-18.00	Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan dan Dilanjutkan Penutupan	Kepala Bappeda Prov. Jatim	Sda	Perwakilan Kelompok dari Masing-Masing Bidang	Sda

H. INFORMASI BAGI PESERTA

Untuk informasi terkait dengan pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 ini, dapat menghubungi Nomor Telpon : (031) 3554851 – 57, dengan nama-nama sebagai berikut :

NO	NAMA	HP
1.	Sdr. DHARMA KIRTI UP.	0812 3140 706
2.	Sdr. DIDIN WAHIDIN, SE	0813 3443 0811
3.	Sdr. ARIEF JULI PRAYITNO	0812 1633 735

Konsumsi dan Penginapan.

Selama pelaksanaan kegiatan panitia menyediakan konsumsi selama pelaksanaan acara yang meliputi makan siang, *snack* serta *coffee break*, dan tidak menyediakan penginapan/hotel.

I. PEMBIAYAAN

Kegiatan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 diselenggarakan dengan sumber pendanaan dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

SEKRETARIAT PANITIA **Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018**
Sekretariat Bappeda Prov. Jatim, Gedung Bappeda Prov. Jatim Lantai 1, d/a. Jl. Pahlawan 102-108 Surabaya, Telp. (031) 3554851-57, Fax: 031-3534339.

J. DAFTAR UNDANGAN

A. FORPIMDA (12 orang)

1. Gubernur Jawa Timur
2. Wakil Gubernur Jawa Timur
3. Pangdam V Brawijaya
4. Kapolda Jawa Timur
5. Pangarmatim
6. Kobang DIKAL
7. Gubernur AAL
8. Kajati Jatim
9. Kepala Pengadilan Tinggi Surabaya
10. Ketua DPRD Jawa Timur
11. Kepala Pengadilan Agama Jawa Timur
12. Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Timur

B. SETDA PROVINSI JAWA TIMUR (4 Orang)

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Administrasi Umum
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

C. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TIMUR (3 Orang)

1. Bidang Hukum dan Politik
2. Bidang Ekonomi dan Keuangan
3. Bidang Pembangunan

D. PD PROVINSI JAWA TIMUR (66 orang)

1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Kepala Dinas Kesehatan

3. Direktur Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
4. Direktur Rumah Sakit Paru Jember
5. Direktur Rumah Sakit Paru Dungus Madiun
6. Direktur Rumah Sakit Kusta Kediri
7. Direktur Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
8. Direktur Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
9. Direktur Rumah Sakit Paru Surabaya
10. Direktur Rumah Sakit Umum Asy-Syaafi Pamekasan
11. Direktur Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
12. Kepala Akademi Keperawatan Madiun
13. Kepala Akademi Gizi Surabaya
14. Kepala UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati – Lawang
15. Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
16. Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang
17. Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
18. Direktur Rumah Sakit Haji Surabaya
19. Sdr. Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
20. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
21. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air
22. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
23. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
24. Kepala Dinas Sosial
25. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
26. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan
27. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

28. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
29. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
30. Kepala Dinas Perhubungan
31. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
32. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
33. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
34. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
35. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
36. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
37. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
38. Kepala Dinas Perkebunan
39. Kepala Dinas Peternakan
40. Kepala Dinas Kehutanan
41. Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
42. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
43. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Jatim
44. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Setda Prov. Jatim
45. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Jatim
46. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda Prov. Jatim
47. Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Alam Setda Prov. Jatim
48. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Jatim
49. Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Jatim
50. Kepala Biro Umum Setda Prov. Jatim

51. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Prov. Jatim
52. Sekretaris Sekretariat DPRD
53. Inspektur Prov. Jatim
54. Kepala Badan Pendapatan Daerah
55. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
56. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
57. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
58. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
59. Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi
60. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
61. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
62. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim I Madiun
63. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim II Bojonegoro
64. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim III Malang
65. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim IV Pamekasan
66. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim V Jember

E. PERWAKILAN PROVINSI LAIN YG BERDEKATAN (2 orang)

1. Kepala BAPPEDA Prov. Jawa Tengah
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Bali

F. KABUPATEN/KOTA (266 orang)

1. Ketua DPRD Kab/Kota = 38 orang
2. Bupati/Walikota = 38 orang
3. Bappeda Kab/Kota
   a. Kepala Bappeda Kab/Kota se-Jatim = 38 orang
   b. Kepala Bidang Perencana Bappeda Kab/ Kota se -Jatim (3 orang) = 114 orang
   c. 1 orang mewakili CSR/ TSP = 38 orang

G. BUMN/BUMD/ SWASTA (44 orang)

1. Pimpinan Bank Indonesia
2. Pimpinan Bank Negara Indonesia
3. Pimpinan Bank Mandiri
4. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia
5. Direktur Utama PT. Bank Jatim
6. Pimpinan Bank Tabungan Negara
7. Direktur Utama PT. BPR Jatim
8. Kepala PT. BPJS Div. Regional VII Jatim
9. Direktur Utama PT. Wira Jatim
10. Kepala BPLS LAPINDO Surabaya
11. Direktur Utama PT. Jatim Investment Management
12. Direktur Utama PT. Jatim Graha Utama
13. Direktur Utama PT. Petrogas Jatim Utama
14. Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama
15. Direktur Utama PT. Lamongan Integreted Shorbase/LIS
16. Direktur Utama PT. Petrokimia Gresik
17. Direktur Utama PT. Semen Indonesia, Tbk.
18. Direktur Utama PT. SIER
19. Direktur Utama PT. Telkom Jawa Timur

20. Direktur Utama PT.Pertamina (Persero) Region V Surabaya
21. Direktur Utama PT. INKA Madiun
22. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Bersih Prov. Jatim
23. Direktur Utama PT. Jasa Tirta I
24. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I
25. Direktur Utama PELINDO III
26. Direktur Utama PTPN X
27. Direktur Utama PTPN XII
28. Direktur Utama TVRI Jawa Timur
29. Direktur Utama RRI Regional Surabaya
30. Direktur PT. CP Prima Pokhpan Sidoarjo
31. Direktur PT. Unilever Surabaya
32. Direktur PT. Sampoerna Surabaya
33. Direktur PT. Nestle Indonesia Pasuruan
34. Direktur Utama PT. Ajinomoto Mojokerto
35. Direktur Utama PT. Japfa Comfeed Sidoarjo
36. Direktur Utama PT. Gudang Garam Kediri
37. Direktur Utama PT. Maspion
38. Direktur PT. Tjiwi Kimia Mojokerto
39. Direktur PT. Cheil Jedang Jombang
40. Direktur PT. PLN (Persero)
41. Manager PT. PLN Distribusi Jawa Timur
42. Kepala Cabang Utama PT. Taspen (Persero)
43. Direktur PT. Astra Internasional, Tbk Surabaya
44. Direktur Utama Perusahaan Gas Negara (PGN)

H. DEPARTEMEN / NON DEPARTEMEN (38 orang)

1. Kakanwil Kementerian Agama
2. Kakanwil Kementerian Kehakiman dan HAM
3. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Negara
4. Kakanwil Ditjen Pajak Jawa Timur
5. Kakanwil Bea dan Cukai
6. Kepala BKKBN Jawa Timur
7. Kepala BPN Jawa Timur
8. Kepala BPS Jawa Timur
9. Kepala Kantor Regional II BKN Jawa Timur
10. Kepala BPWS Suramadu Jawa Timur
11. Kepala BPKP Jawa Timur
12. Kepala Kantor Perwakilan BPK Jawa Timur
13. Kepala Pusat Veterinaria Farma Surabaya
14. Kepala Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat Malang
15. Kepala Balai Teknologi Pertanian Jawa Timur di Karangploso
16. Kepala Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan Jawa Timur
17. Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam
18. Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri
19. Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo
20. Kepala Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
21. Kepala Balai Taman Nasional Baluran.
22. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
23. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur
24. Kepala DAOP VIII PT. KAI Surabaya
25. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V

26. Kepala Satker Air Minum dan Sanitasi Jawa Timur
27. Kepala Satker Pengembangan Permukiman Jawa Timur
28. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Juanda, Surabaya
29. Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya
30. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas
31. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo
32. Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP)
33. Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI)
34. Ketua REI Jawa Timur
35. Ketua Forum CSR Prov. Jatim
36. Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Jawa Timur
37. Ketua Forum DAS Jawa Timur
38. Ketua Forum DAS Malang

I. DPRD PROVINSI JAWA TIMUR (18 orang)

1. Wakil Ketua I DPRD
2. Wakil Ketua II DPRD
3. Wakil Ketua III DPRD
4. Wakil Ketua IV DPRD
5. Ketua Komisi A DPRD
6. Ketua Komisi B DPRD
7. Ketua Komisi C DPRD
8. Ketua Komisi D DPRD
9. Ketua Komisi E DPRD
10. Ketua Fraksi Partai Demokrat Prov. Jawa Timur
11. Ketua Fraksi PDIP Prov. Jawa Timur

12. Ketua Fraksi PKB Prov. Jawa Timur
13. Ketua Fraksi Partai Golkar Prov. Jawa Timur
14. Ketua Fraksi Partai GERINDRA Prov. Jawa Timur
15. Ketua Fraksi PAN Prov. Jawa Timur
16. Ketua Fraksi PKS Prov. Jawa Timur
17. Ketua Fraksi Partai NASDEM dan HANURA Prov. Jawa Timur
18. Ketua Fraksi PPPR Prov. Jawa Timur

J. PARTAI POLITIK (10 orang)

1. Ketua DPD Partai Demokrat Prov. Jawa Timur
2. Ketua DPD PDIP Prov. Jawa Timur
3. Ketua DPD PKB Prov. Jawa Timur
4. Ketua DPD Partai Golkar Prov. Jawa Timur
5. Ketua DPD Partai GERINDRA Prov. Jawa Timur
6. Ketua DPD PAN Prov. Jawa Timur
7. Ketua DPD PKS Prov. Jawa Timur
8. Ketua DPD PKNU Prov. Jawa Timur
9. Ketua DPD Partai HANURA Prov. Jawa Timur
10. Ketua DPD PPPR Prov. Jawa Timur

K. PERGURUAN TINGGI (16 orang)

1. Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa)
2. Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember
3. Rektor Universitas Airlangga
4. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
5. Rektor Universitas BRAWIJAYA Malang
6. Rektor Universitas Negeri Malang
7. Rektor Universitas Jember

8. Rektor Universitas Trunojoyo Bangkalan
9. Rektor Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
10. Rektor Universitas Kristen Petra Surabaya
11. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
12. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
13. Rektor Universitas Sunan Giri Sidoarjo
14. Rektor Universitas Surabaya (Ubaya)
15. Rektor Universitas Islam Negeri Madura di Pamekasan
16. Koordinator Kopertis Wilayah VII Jawa Timur

L. BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (15 orang)

1. BEM Universitas Negeri Surabaya
2. BEM Institut Teknologi Sepuluh Nopember
3. BEM Universitas Airlangga
4. BEM IAIN Sunan Ampel
5. BEM Universitas BRAWIJAYA Malang
6. BEM Universitas Negeri Malang
7. BEM Universitas Jember
8. BEM Universitas Trunojoyo Bangkalan
9. BEM Universitas Kristen Petra Surabaya
10. BEM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
11. BEM Universitas Surabaya (Ubaya)
12. BEM Universitas Muhammadiyah Malang
13. BEM Universitas Sunan Giri Sidoarjo
14. BEM Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
15. BEM Universitas Islam Negeri Madura di Pamekasan

M. LSM/ORMAS (39 orang)

1. Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim
2. Ketua Yayasan Abdi Asih
3. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu/PPT Jatim
4. Ketua APJATI (Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) Jawa Timur
5. Ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia)
6. Ketua KADIN (Kamar Dagang dan Industri)
7. Ketua AEKI (Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia)
8. Ketua KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan)
9. Ketua KPTRI (Koordinator Pengusaha Tebu Rakyat Indonesia)
10. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
11. Ketua Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesia
12. Ketua Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional
13. Ketua GINSI (Gabungan Inportir Seluruh Indonesia)
14. Ketua GPEI (Gabungan Perusahaan Eksport Indonesia)
15. Ketua Asosiasi Eksportir dan Produsen *Handycraft* Indonesia
16. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
17. Ketua DPD GAPASDAP (Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) Jatim
18. Ketua DPD ORGANDA Jawa Timur
19. Ketua Lakpesdam NU
20. Ketua Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
21. Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur
22. Ketua SBSI (Serikat Buruh Seluruh Indonesia)
23. Ketua SPSI (Serikat Pekerja seluruh Indonesia)
24. Ketua SARBUMUSI (Serikat Buruh Muslim Indonesia)

25. Ketua Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS Prov. Jatim
26. Ketua Dekranasda Jawa Timur
27. Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Jawa Timur
28. Ketua Aisyah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur
29. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur
30. Ketua KOPWAN Setia Bakti Wanita Surabaya
31. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jawa Timur
32. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur
33. Pengasuh Ponpes Darul Ulum Jombang
34. Pengasuh Ponpes Tebu Ireng Jombang
35. Pengasuh Ponpes Tambak Beras Den Anyar Jombang
36. Pengasuh Ponpes Al Amin Preduan Pamekasan
37. Ketua Fatayat NU
38. Ketua Muslimat NU
39. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur

N. PERWAKILAN DONOR (5 orang)

1. Perwakilan Unicef
2. AUSAID
3. World Bank
4. USAID
5. JICA

O. DEWAN RISET DAERAH (DRD) PROV JATIM (4 orang)

1. Prof.Dr. Hotman M. Siahaan (Ketua DRD)
2. Prof.Dr. Soenyono, SH, M.Si (Wakil Ketua DRD)
3. Totok Soewarto, SH, M.Si (Wakil Ketua DRD)
4. Drs. Tjahjo P.Wijadi (Sekretaris DRD)

P. LINTAS AGAMA (7 orang)

1. Ketua DPW Muhammadyah Jawa Timur
2. Ketua DPW NU Jawa Timur
3. Ketua PGI Wilayah Jawa Timur
4. Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesi (Walubhi) Jawa Timur
5. Ketua Parisadha Hindhu Darma Indonesia (PHDI)
6. Ketua Komite Lintas Agama (KLA)
7. Ketua MUI Jawa Timur Jl. Dharmahusada

TOTAL UNDANGAN

A	FORPIMDA	=	12 orang
B	SETDA PROVINSI JAWA TIMUR	=	4 orang
C	STAF AHLI GUBERNUR	=	3 orang
D	PD PROVINSI JAWA TIMUR	=	66 orang
E	PERWAKILAN PROVINSI LAIN	=	2 orang
F	KABUPATEN/KOTA	=	266 orang
G	BUMN/BUMD/SWASTA	=	44 orang
H	DEPARTEMEN / NON DEPARTEMEN	=	38 orang
I	DPRD PROVINSI	=	18 orang
J	PARTAI POLITIK	=	10 orang
K	PERGURUAN TINGGI	=	16 orang
L	BEM	=	15 orang
M	LSM/ORMAS	=	39 orang
N	PERWAKILAN DONOR	=	5 orang
O	DRD PROV. JATIM	=	4 orang
P	LINTAS AGAMA	=	7 orang
	TOTAL UNDANGAN	=	**549** orang